



LKj TAHUN 2025

**BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



**BAPPEDA-LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

2026



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Affan Bachsin, Telepon/fax (0739) 21475

Website: bappeda.bengkuluselatankab.go.id, email: bappeda@bengkuluselatankab.go.id, Manna

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 08 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN KINERJA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta untuk menjamin penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD perlu disusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Litbang tentang Laporan Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 Nomor 05);
8. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Kinerja (Lkj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan, merupakan hasil evaluasi dan penilaian capaian kinerja terhadap sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama 1 (satu) tahun.
- KEDUA : Laporan Kinerja (LKj) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, bertujuan untuk:
- a. Pertanggung jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja selama satu tahun.
 - b. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
 - c. Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;

- KETIGA : Dalam pelaksanaan penyusunan Laporan kinerja (LKj), tim yang bertugas memiliki hak dan kewenangan meminta data, informasi dan/atau referensi yang dibutuhkan ke unit kerja lain dalam satu perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 09 Februari 2026

KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



FIKRI ALJAUHARY, SSTP., MM.

Pembina TK.I/IV.b

NIP.19821001 200112 1 002

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LKj Tahun 2025 pada dasarnya menggambarkan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara utuh selama perjalanan Tahun 2025, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah direvisi berdasarkan rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP 2024 dan telah ditetapkan kembali dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja input, output dan outcome dari setiap program dan kegiatan.

Akhir kata, melalui penyampaian LKj Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025 akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi Perencanaan Program dan Kegiatan tahun yang akan datang.

Manna, 09 Februari 2026

Kepala Bappeda Litbang



FIKRI ALJAUHARY, S.STP, MM

NIP. 19821001 200112 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan unsur penunjang, yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang tugas pokoknya adalah melaksanakan fungsi Penunjang urusan Pemerintah Bidang Perencanaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Berdasarkan telaah terhadap pernyataan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan termuat dalam misi ke-4 yakni ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan public yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi*** yang bertujuan untuk :

1. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan.

Dengan target sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas
2. Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah

Relevansi dan konsistensi antara pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tertuang dan Rencana Strategis

Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Visi	Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) Berlandaskan CINTA BS (Cerdas, Integritas, iNovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya Saing)		
Misi ke-4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan public yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi.		
Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Kebijakan OPD
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	1. Meningkatkan sinergi Dokumen Perencanaan melalui program Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Meningkatkan Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran melalui : - Kegiatan Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah - Kegiatan Perencanaan dan Pendanaan 3. Meningkatkan kualitas kajian perencanaan pembangunan daerah melalui Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah.	1. Meningkatkan kesesuaian substansi dalam dokumen Perencanaan (RPJMD dan RPJMN) dengan melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah 2. Mengoptimalkan kesesuaian Program/Kegiatan dan Sub kegiatan, dengan melaksanakan : - pendampingan dan asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 3. Perbaiki kualitas Perencanaan dengan mempertimbangkan kesesuaian isu strategis, dengan berkoordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
Menujudkan capaian kapasitas inovasi daerah	Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi daerah melalui kegiatan Pengembangan Inovasi dan teknologi	Percepatan penumbuhan inovasi daerah dengan terbentuknya Perbup tentang Inovasi Daerah dan melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah pengusung inovasi dengan dibentuknya Klinik Inovasi.

Sumber : Penetapan IKU Bappeda Litbang 2024-2026

Dari penetapan tujuan, sasaran, Staregi dan kebijakan yang disusun oleh Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana diatas, maka ditetapkan target capaian yang diharapkan dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan indikator targetnya adalah :

1. Indeks Perencanaan Pembangunan
2. Persentase Sinergi Dokumen Perencanaan
3. Persentase Kualitas Perencanaan
4. Persentase keterhubungan perencanaan Pembangunan daerah dan Perencanaan Kinerja
5. Persentase Nilai Kematangan Inovasi Daerah
6. Indeks Inovasi Daerah
7. Nilai AKIP Perangkat Daerah
8. Nilai Perencanaan Daerah
9. Nilai Pengukuran Kinerja
10. Nilai kualitas perencanaan
11. Persentase Penelitian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan pembangunan
12. Persentase Peningkatan Indeks Inovasi Daerah

Pencapaian Kinerja Bappeda Litbang selama 5 (lima) Tahun, yaitu tahun 2021 – 2025 adalah sebagai berikut :

No	IKU	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Perencanaan Pemangunan	n/a	n/a	n/a	84,92	84,92
2	Persentase Sinergi Dokumen Perencanaan	n/a	n/a	n/a	77,25	77,25
3	Persentase Kualitas Perencanaan	n/a	n/a	n/a	86,55	86,55
4	Persentase Keterhubungan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Kinerja	n/a	n/a	n/a	100	100

5	Persentase Nilai Kematangan Inovasi Daerah	n/a	n/a	67,64	91,11	90,91
6	Indeks Inovasi Daerah	50,42	37,95	51,45	54,34	62,27
7	Nilai AKIP Perangkat Daerah	77,00	70,01	74,01	62,05	71,50
8	Nilai Perencanaan Kinerja	20,42	21,19	21,68	22,12	22,38
9	Nilai Pengukuran Kinerja	14,05	15,05	15,46	15,65	15,86
10	Nilai kualitas Perencanaan	n/a	n/a	n/a	50,20	50,20
11	Persentase Penelitian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan pembangunan	n/a	n/a	47,05	50,00	50,00
12	Persentase Peningkatan indeks Inovasi Daerah	n/a	n/a	36,29	5,61	14,59

Sumber :

Laporan Tahunan Bappeda Litbang Tahun 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan LKj	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan LKj	3
1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah	5
A. SOTK	7
B. Isu Strategis Perangkat Daerah	9
C. Keadaan Kepegawaian	10
D. Keadaan Sarana dan Prasarana	14
E. Keuangan	17
1.5. Sistematisasi LKj.....	20
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis	23
A. Visi dan Misi Kepala Daerah	23
B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	26
C. Strategi dan arah kebijakan	27
2.2. Perjanjian Kinerja	29
2.3. Rencana Anggaran Perangkat Daerah	34
A. Target Belanja	34
B. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategi	37
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	40
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	43
3.3. Realisasi Anggaran	57
3.4. Inovasi Perangkat Daerah	61
3.5. Aktualisasi dan Implementasi Core Values BerAKHLAK	64
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Rekomendasi	67

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jenjang Pendidikan SDM Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan....	10
Tabel 1.2	SDM Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Susunan Organisasi.....	11
Tabel 1.3	Indeks IP ASN Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.....	12
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Non ASN Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024	14
Tabel 1.5	Belanja pelaksanaan kegiatan Tahun 2025	17
Tabel 2.1.	Visi Dan Misi Kepala Daerah	24
Tabel 2.2.	Tujuan Dan Sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.....	26
Tabel 2.3.	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.....	28
Tabel 2.4.	Belanja pelaksanaan kegiatan Tahun 2025	35
Tabel 2.5.	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	38
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	41
Tabel 3.2.	Pencapaian IKU Bappeda Litbang.....	42
Tabel 3.3.	Realisasi Indikator 1 sasaran 1.1	44
Tabel 3.4.	Realisasi Indikator 1 sasaran 1.2	46
Tabel 3.5.	Realisasi Indikator 1 sasaran 1.3	49
Tabel 3.6.	Realisasi Indikator 1 sasaran 1.4	50
Tabel 3.7.	Realisasi Indikator 2 sasaran 1	51
Tabel 3.8.	Pencapaian Kinerja dan Serapan Anggaran Tujuan/Sasaran	53
Tabel 3.9.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program/Kegiatan	54
Tabel 3.10.	Realisasi Belanja pelaksanaan kegiatan Tahun 2025	57

Bab 1 berisikan:

1. *Latar Belakang*
2. *Tujuan Penyusunan LKj*
3. *Dasar Hukum Penyusunan LKj*
4. *Gambaran Umum PD*
 - a. *SOTK*
 - b. *Isu Strategis*
 - c. *Keadaan Pegawai*
 - d. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
 - e. *Keuangan*
5. *Sistematika LKj*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, diperlukan penilaian dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah sebagai salah satu kunci. Hal ini selaras dengan tujuan perbaikan dan inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dukungan dari semua elemen masyarakat sangat diperlukan dalam perbaikan kinerja pemerintahan untuk mencapai daerah otonomi yang lebih baik.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan

realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

1.2. Tujuan Penyusunan LKj

LKj Bappeda Litbang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Badan selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap bidang. Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Bappeda Litbang. Identifikasi potensi, keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintahan untuk meningkatkan kinerja melalui perbaikan pelayanan publik. LKj adalah Sebagai pembanding keberhasilan, capaian kinerja tahun 2025 juga dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang lalu. Analisis atas pembandingan capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini perlu dilakukan untuk melihat celah kinerja (*performance gap*) yang perlu diperbaiki oleh Bappeda Litbang dimasa datang. Adapun tujuan laporan Kinerja (LKj) adalah :

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Bappeda Litbang
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Bappeda Litbang.
3. Menemukan alternative pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

4. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Bappeda Litbang kepada Bupati
5. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Bappeda Litbang.
6. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Bappeda Litbang.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan LKj

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah yang merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Bappeda- Litbang didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan Kinerja, diantaranya adalah:

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang – Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor : 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 7023);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan unsur penunjang, yang dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang tugas pokoknya adalah melaksanakan fungsi Penunjang urusan Pemerintah Bidang Perencanaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Berdasarkan telaah terhadap pernyataan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan termuat dalam misi ke-4 yakni ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi*** yang bertujuan untuk :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan.

Dengan target sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas
2. Meningkatnya capaian kapasitas Inovasi Daerah.

Relevansi dan konsistensi antara pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tertuang

dan Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Visi	Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) Berlandaskan CINTA BS (Cerdas, Integritas, iNovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya Saing)		
Misi ke-4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan public yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi.		
Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Kebijakan OPD
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	1. Meningkatkan sinergi Dokumen Perencanaan melalui program Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Meningkatkan Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran melalui : - Kegiatan Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah - Kegiatan Perencanaan dan Pendanaan 3. Meningkatkan kualitas kajian perencanaan pembangunan daerah melalui Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah.	4. Meningkatkan kesesuaian substansi dalam dokumen Perencanaan (RPJMD dan RPJMN) dengan melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah 5. Mengoptimalkan kesesuaian Program/Kegiatan dan Sub kegiatan, dengan melaksanakan : - pendampingan dan asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 6. Perbaiki kualitas Perencanaan dengan mempertimbangkan kesesuaian isu strategis, dengan berkoordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
Menujudkan capaian kapasitas inovasi daerah	Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi daerah melalui kegiatan Pengembangan Inovasi dan teknologi	Percepatan penumbuhan inovasi daerah dengan terbentuknya Perbup tentang Inovasi Daerah dan melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah pengusung inovasi dengan dibentuknya Klinik Inovasi.

Sumber : Penetapan IKU Bappeda Litbang 2024-2026

A. SOTK

Merujuk ke Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang Penelitian Pengembangan yang menjadi kewenangan kabupaten.

Sedangkan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah :

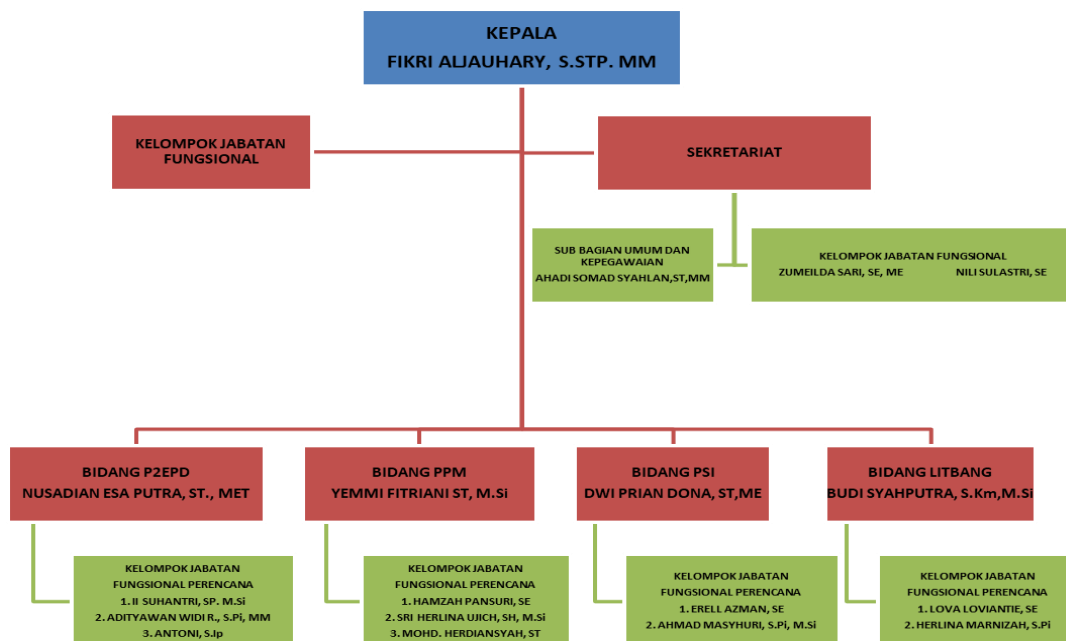
1. perumusan kebijakan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. pelaksanaan kebijakan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan;
5. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dengan susunan Organisasi Badan terdiri atas :

- b. Kepala Badan.
- c. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud seperti digambarkan berikut :

Struktur Organisasi Bappeda Litbang



Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencanaan dalam hal ini Bappeda Litbang yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

B. Isu Strategis Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Bappeda Litbang sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses brainstorming dan mapping jenis layanan yang telah dilakukan oleh Bappeda Litbang, factor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Bappeda Litbang adalah sebagai berikut:

- 1 Belum terbangunnya sistem informasi data pembangunan yang menyeluruh dan terpadu
- 2 Belum optimalnya analisis usulan program dan kegiatan dengan OPD sehingga masih terjadi ketidaksesuaian antara output dan outcome yang dihasilkan.
- 3 Belum optimalnya hasil kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan merumuskan Program prioritas Perencanaan yang merujuk kepada Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026. Rumusan Perencanaan kinerja akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya, yang diantaranya memuat kebijakan, tujuan dan sasaran. Dengan indikator yang terukur, baik indikator Kinerja Utama Kepala Bappeda Litbang, Sekretaris dan Kepala Bidang yang diimplimentasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

C. Keadaan Pegawai

Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Per Desember 2024, Bila dirunut per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut: S2 sebanyak 13 orang (27,08%) S1 sebanyak 33 orang (68,75%), D3 1 orang (2,08%) kemudian SLTA sebanyak 1 orang (2,08%). Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki keragaman sumber daya manusia yang baik. Komposisi per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jenjang Pendidikan SDM Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S3	0
2.	S2	13
3.	S1	33
4.	D3	1
5.	D2	0
5.	D1/SLTA/MA/SMK	1
6.	SLTP/MTs	0
7.	SD	0
Jumlah		48

Sumber : DUK Bappeda Litbang 2025.

Guna mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui program sesuai nomenklatur, komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Bidang dilingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sbb :

Tabel 1.2 SDM Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Susunan Organisasi

NO	UNIT ORGANISASI	JUMLAH
1.	Sekretariat (Program Penunjang)	13
2.	Bidang P2EPD (Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah)	9
3.	Bidang PSI (Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	10
4.	Bidang PPM (Program Koordinasi dan Siskronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah)	9
5.	Bidang Penelitian dan Pengembangan (Program Penelitian dan Pengembangan)	7
Jumlah		48

Sumber : Laporan Tahunan Bappeda Litbang 2025.

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa komposisi Sumber Daya Manusia pada Pencapaian Sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas yaitu : Bidang P2EPD sebanyak 9 orang, atau 18,75%, Bidang PSI sebanyak 10 orang, atau 20,83% dan Bidang PPM sebanyak 9 orang, atau 18,75%. Untuk sasaran Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah yaitu : bidang LITBANG sebanyak 7 orang, 14,58%, dan untuk Program Penunjang Urusan yaitu : Sekretariat Bappeda Litbang sanyak 13 orang, atau 27,08%.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah Profesionalitas. Sumber

Daya Manusia (SDM) dilingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional.

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa, berikut disajikan table Indeks Profesionalitas ASN :

Tabel 1.3 Indeks IP ASN Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Nama	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai	IPA
Sekretariat						
Fikri Aljauhary	20	25	25	5	75	Sedang
Zumeilda sari	20	25	25	5	75	Sedang
Nili Sulastri	15	25	25	5	70	Rendah
A Somad Syahlan	20	25	25	5	75	Sangat Rendah
Yenni Juniart	15	40	25	5	85	Tinggi
Deti Haryani	15	17,5	25	5	62,5	Rendah
Emisti	15	17,5	25	5	62,5	Rendah
Desy Puspa H	15	17,5	25	5	62,5	Rendah
Vivit Giantari	15	17,5	25	5	62,5	Rendah
Mesi Nirmala	10	-	25	5	40	Sangat Rendah
Bidang P2EPD						
Nusadian E.S	20	25	25	5	75	Sedang
Ii Suhantri	20	25	25	5	75	Sedang
Antoni	15		25	5	45	Sangat Rendah
Adityawan W R	20		25	5	50	Sangat Rendah
Hendrik S	15	40	25	5	85	Tinggi
Nur Budiati	15	17,5	25	5	62,5	Rendah
M. Redho	15	17,5	25	5	62,5	Rendah
Bidang PSI						
Dwi Prian D	20	40	25	5		Tinggi
A Masyhuri	20	25	25	5	70	Rendah
Erell Azman	15		25	5	45	Sangat Rendah
Dedi Susanto	20	40	25	5	90	Tinggi
Eti Nurhayati	15	17,5	25	5	62,5	Rendah
Enni	15	17,5	25	5	62,5	Rendah
Yessi Puspita	15	17,5	25	5	62,5	Rendah
Meta Ernasari	15		25	5	45	Sangat Rendah
Elvi Diansari	15	17,5	25	5	62,5	Rendah
Dusmi Harlena	15		25	5	45	Sangat Rendah

Bidang PPM						
Yemmi Fitriani	20	15	25	5	65	Rendah
Sri Herlina U C	20		25	5	50	Sangat Rendah
Hamzah Pansuri	15		25	5	45	Sangat Rendah
Moh Herdiansyah	15		25	5	45	Sangat Rendah
A Zaki	15			5	20	Sangat Rendah
Merry S Nengsih	15	17,5	25	5	62,5	Rendah
Maryuliana	15	17,5	25	5	62,5	Rendah
R Reki D Siregar	15	17,5	25	5	62,5	Rendah
Candra Wijaya	10	40	25	5	80	Sedang
Yeti Herawati	5		25	5	35	Sangat Rendah
Bidang Litbang						
Budi Syahputra	20	25	25	5	75	Sedang
Herlina Marnizah	15		25	5	45	Sangat Rendah
Lova Lovianti	20		25	5	50	Sangat rendah
Fetri Yeni W	15	17,5	25	5	62,5	Rendah
Suratin	15		25	5	45	Sangat rendah
Herlina Tri S	15	17,5	25	5	62,5	Rendah
Puti Emban Sari	15	17,5	25	5	62,5	Rendah

Sumber : Laporan IPA ASN Bappeda Litbang 2025.

Dapat dilihat capaian IP ASN dilingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Profesionalitas Sangat Tinggi (91-100) = -
2. Tingkat Profesionalitas Tinggi (81-90) = 3 Pegawai
3. (JFP)Tingkat Profesionalitas Sedang (71-80) = 7 Pegawai
4. Tingkat Profesionalitas Rendah (61-70) = 17 Pegawai
5. Tingkat Profesionalitas Sangat Rendah ≤ 60 = 21 Pegawai

Sedangkan Indeks Profesionalitas ASN Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar = 58,78 (Sangat Rendah).

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. ASN yang masih kurang memahami aspek-aspek penilaian Indeks Profesionalitas ASN
2. Kurangnya kesadaran untuk mengembangkan kompetensi melalui

pelatihan-pelatihan, diklat dan media peningkatan kompetensi lainnya.

3. Belum tersedianya wadah bagi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) untuk mengikuti Diklat Jabatan Fungsional, baik itu di Pusbindiklatren, BPSDM Kemendagri maupun BPSDM Propinsi Bengkulu.

Pegawai Non ASN

Selain Pegawai yang berstatus ASN pada Bappeda Litbang juga terdapat Tenaga Kerja Non ASN, secara lengkap komposisi Tenaga Non ASN Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan tugas dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Non ASN Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024

Nomor	Tugas	Jumlah
1	Operator Komputer	16
2	Sopir	1
3	Penjaga Malam	1
4	Petugas Kebersihan	3
5	Resepsionis	2
6	Pantry/Pramusaji	2
	Jumlah	25 orang

Sumber : Laporan Tahunan Bappeda Litbang 2025

D. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan serta meningkatkan pelayanan publik pada Perangkat Daerah, maka Kondisi sarana dan prasarana pendukung Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dapat diuraikan sebagai berikut :

**PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR**



74 Unit



107 Unit

1) Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Berdasarkan inventarisasi, Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki 74 unit meja kerja dan 107 unit kursi kerja, terdiri dari 4 Kursi tamu, 40 kursi rapat. 43 kursi besi, 4 kursi putar 7 kursi pejabat eselon II,III,IV dan 9 kursi kerja pejabat lainnya. Jumlah ini secara kuantitatif sebanding dengan jumlah pegawai yang mencapai 48 ASN, sehingga kebutuhan

dasar ruang kerja secara umum dapat dikatakan terpenuhi. Namun, distribusi peralatan tidak selalu merata antar bagian, sehingga pada beberapa ruangan masih ditemukan penggunaan kursi dan meja yang tidak standar. Selain itu, sebagian perabotan sudah berusia lama dan kualitasnya menurun. Hal ini berpotensi mengurangi kenyamanan kerja pegawai dan produktivitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, ke depan perlu dilakukan peremajaan peralatan kantor secara bertahap, sekaligus penataan ruang agar lebih ergonomis, ramah disabilitas, serta mendukung konsep perkantoran modern yang kolaboratif.

PERALATAN T I K



48 Unit



5 Unit



5 Unit



2 Unit



7 Unit



1 Unit

2) Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Ketersediaan perangkat TIK saat ini mencakup 48 unit laptop, 5 unit PC, 7 unit printer, 2 unit HDD, 1 unit scanner dan 5 unit monitor. Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai, maka rasio perangkat komputer (laptop + PC) untuk 48 pegawai. Artinya, sudah dapat mencukupi kebutuhan tugas seperti penyusunan dokumen perencanaan, pengolahan data, riset, dan evaluasi yang sangat bergantung pada ketersediaan perangkat digital.

SARANA TRANSPORTASI DINAS



6 Unit



18 Unit

3) Sarana Transportasi Dinas

Untuk mendukung mobilitas pegawai dalam koordinasi lintas wilayah serta pelaksanaan tugas lapangan, Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini memiliki 6 unit mobil dinas dan 18 unit sepeda motor. Dari jumlah tersebut, mobil dinas didistribusikan terutama untuk pejabat eselon II dan III yang total berjumlah 6 orang, sedangkan sisanya digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional kelembagaan seperti perjalanan dinas, monitoring pembangunan, dan koordinasi antar wilayah. Sementara itu, sepeda motor dimanfaatkan secara luas

sebagai sarana operasional pegawai dalam kegiatan perencanaan dan pengumpulan data di lapangan, khususnya pada lokasi-lokasi yang sulit dijangkau kendaraan roda empat.

Meskipun jumlah sarana transportasi secara umum cukup memadai, terdapat beberapa unit kendaraan, baik mobil maupun motor, yang sudah berusia lama dan memerlukan peremajaan. Kondisi kendaraan yang menurun berdampak pada meningkatnya biaya pemeliharaan, menurunnya efisiensi operasional, serta berpotensi mengganggu kelancaran tugas.

Ke depan, selain melakukan peremajaan armada, Bappeda Litbang juga perlu mempertimbangkan penggunaan kendaraan operasional yang lebih ramah lingkungan, hemat energi, dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan mendukung efektivitas kerja, tetapi juga menjadi contoh nyata penerapan prinsip pembangunan hijau di lingkungan pemerintahan daerah.

4) Sarana Penunjang Lainnya

SARANA PENUNJANG LAINNYA



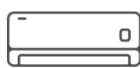
4 Unit



1 Unit



1 Unit



18 Unit



5 Unit



1 Unit



Bappeda Litbang juga memiliki fasilitas penunjang berupa 4 unit proyektor, 4 unit televisi, 20 unit lemari terdiri dari 15 lemari kayu, 2 lemari kaca, 2 lemari arsip dan 1 lemari es, 18 unit AC terdiri dari 1 AC central dan 17 AC Unit, 5 unit kamera terdiri dari 2 video recorder dan 3 kamera elektronik, 1 unit sound sistem 1 unit wireless microphone dan 1 unit drone.

E. Keuangan

Anggaran

Sesuai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan mengelola anggaran sebesar Rp. 8.912.914.360, yang terdiri dari :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Belanja Operasi | Rp.8.583.423.480,- |
| - Belanja Pegawai | Rp.5.110.708.720,- |
| - Belanja Barang dan Jasa | Rp.3.472.714.760,- |
| 2. Belanja Modal | Rp. 329.490.880,- |

Berikut disajikan rincian dana sesuai program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Tabel :

Tabel 1.5 Belanja pelaksanaan kegiatan Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Output (Keluaran)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	7.034.161.560,-	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	80.800.000,-	
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.500.000,-	Dokumen RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, Renja, Renja Perubahan dan Perubahan Renstra Lakip, LPPD, Lap. Triwulan, Lap Tahunan dan pelaksanaan rapat evaluasi kinerja
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.300.000,-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.493.091.720,-	
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.110.708.720,-	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN, Terlaksananya administrasi pelaksanaan Tugas ASN Dokumen laporan keuangan, Terpenuhinya jasa administrasi keuangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	370.280.000,-	
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.103.000,-	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.999.950,-	
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.253.000,-	Dokumen BMD SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.435.000,-	
1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21.080.000,-	Dokumen administrasi kepegawaian
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	42.355.000,-	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	515.262.000,-	
1. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.615.000,-	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya alat tulis kantor, tersedianya
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.146.000,-	
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.481.000,-	

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.000.000,-	makanan dan minuman
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	65.750.000,-	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.270.000,-	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	253.136.680,-	Dalam Daerah, Luar Daerah
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	253.136.680,-	Tersedianya Peralatan penunjang penyelesaian kerja dan kinerja
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.301.160,-	
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.301.160,-	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.882.000,-	
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	297.643.000,-	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.319.000,-	Terpeliharanya gedung kantor
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.920.000,-	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	601.488.000,-	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	322.554.000,-	
1. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	66.000.000,-	Memingkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
2. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	256.554.000,-	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	94.500.000,-	
1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	94.500.000,-	Update data dan informasi pembangunan daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	96.434.000,-	
1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	44.145.000,-	Meningkatkan pencapaian kinerja program/kegiatan pemerintah daerah
2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	52.289.000,-	Peningkatan kualitas capaian pelaksanaan rencana pembangunan
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	88.000.000,-	
1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pemerintah Daerah	88.000.000,-	Tersedianya jumlah data dalam system informasi Pemerintah Daerah Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	996.955.400,-	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	377.083.200,-	
1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	72.078.000,-	Tersedianya Dokumen Aksi Stunting
2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	42.533.000,-	Tersedianya laporan Hasil Evaluasi PAMSIMAS
3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.804.000,-	Terlaksananya advokasi indikator SDG's
4. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	47.152.000,-	Jumlah OPD yang di asistensi

Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	82.441.000,-	Terlaksananya operasional tim TKPKD dan oprasional tim corporate social responsibility (CSR)
6. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	86.075.200,-	Terlaksananya koordinasi pembangunan bidang sosbud
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	266.305.200,-	
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	69.295.200,-	Peningkatan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	16.095.000,-	Tersediannya Laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Bidang Perekonomian
3. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	107.451.000,-	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA, Laporan gas rumah kaca (GRK), Dokumen RAD pangan dan Gizi, Laporan GRK Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	19.909.000,-	Tersediannya Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang SDA
5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	58.555.000,-	Tersediannya Laporan Hasil Verifikasi Bidang SDA
Koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	353.567.000,-	
1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	184.908.000,-	Terlaksananya pendampingan penyusunan Dokumen Perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang Mitra
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	14.154.000,-	Tersediannya Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur
3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	154.505.000,-	Laporan pokja PKP, Peningkatan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang keciptakaryaan dan kewilayahan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	280.309.400,-	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	59.193.000,-	
1. Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	59.193.000,-	Laporan analisis indeks daya saing daerah dan penginputan indeks pengelolaan keuangan daerah
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	63.564.000,-	
1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	63.564.000,-	Berkembangnya varietas unggul lokal kabupaten Bengkulu Selatan
Pengembangan inovasi dan Teknologi	157.552.400,-	
1. Penelitian, Pemhembangan dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	88.632.600,-	Dokumen sistem inovasi daerah, Input indeks daerah, Lomba inovasi IPTEK
2. Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-hasil Kelitbang	68.919.800,-	Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi

Sumber : DPA Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan 2025.

Dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, dari table 1.6 diatas dapat dijelaskan bahwa, untuk tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas tersedia anggaran dari Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp.1.598.443.400,- atau 17,93%, dan untuk tujuan 2 : Mewujudkan capaian kapasitas Inovasi Daerah tersedia anggaran dari Program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp.280.309.400,- atau 3,14%, selebihnya sebesar Rp.7.034.161.560,- atau 78,93 % dialokasikan ke Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian 57,34% diperuntukan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai dan 21,59% digunakan untuk mengakomodir Rutin Kantor.

1.5 Sistematika LKj

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka format penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini terdiri dari :

BAB I	: Pada bab ini disajikan penjelasan umum
Pendahuluan	Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mencakup :
1.1	Latar Belakang
1.2	Tujuan Penyusunan LKj
1.3	Dasar Hukum Penyusunan LKj
1.4	Gambaran Umum Perangkat Daerah
	A. SOTK

B. Isu Strategis Perangkat Daerah C. Keadaan Pegawai D. Keadaan Sarana dan Prasarana E. Keuangan 1.5 Sistematika LKj	
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	: Menguraikan tentang ikhtisar Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, yang mencakup: 2.1 Perencanaan Strategis A. Visi dan Misi Kepala Daerah B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah C. Strategi dan arah kebijakan 2.2 Perjanjian Kinerja 2.3 Rencana Anggaran Perangkat Daerah A. Target Belanja B. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis
BAB III Akuntabilitas Kinerja	: Menggambarkan akuntabilitas kinerja yang mencakup: 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama PD - Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir - Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja - Dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

	peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, - Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya. 3.3 Realisasi Anggaran Berisikan table realisasi anggaran disertai dengan penjelasan pencapaian terhadap target belanja yang sudah ditetapkan sebelumnya. 3.4 Inovasi Perangkat Daerah Menjelaskan Inovasi yang sudah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja PD. 3.5 Aktualisasi dan Implementasi BerAKHLAK Menjelaskan kegiatan-kegiatan aktualisasi core values BerAKHLAK.
BAB IV Penutup	: Berisikan uraian simpulan umum atas capaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk meningkatkan kinerjanya, dengan rincian : 4.1 Kesimpulan 4.2 Rekomendasi

Disamping itu, sebagai data pendukung juga dilampirkan Rencana Kerja Tahunan dan Pengukuran Pencapai Sasaran, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan dan lain-lain yang dianggap relevan.

Bab 2 berisikan:

1. *Perencanaan Strategis*
 - a. *Visi dan Misi Kepala Daerah*
 - b. *Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah*
 - c. *Strategi dan arah kebijakan*
2. *Perjanjian Kinerja*
3. *Rencana Anggaran PD*
 - a. *Target Belanja*
 - b. *Alokasi Anggaran per sasaran Strategis*

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan kerangka Pembangunan Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai Dokumen perencanaan yang memuat penjabaran sesuai dengan kewenangannya. Memuat tujuan, sasaran dan program Bappeda Litbang. Renstra berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026. Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi pijakan bagi perencanaan strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan.

A. Visi dan Misi Kepala Daerah

Bappeda Litbang mengampu urusan perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan urusan dan program yang diampu, Bappeda Litbang mendukung Visi “Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS Berlandaskan CINTA BS” yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang mempunyai 4 (empat) misi, seperti tertuang dalam Tabel Berikut :

Tabel 2.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

VISI	Misi	Sasaran Daerah
Terwujudnya Masyarakat Madani menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman dan Sejahtera) Berlandaskan CINTA-BS	1. Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, sejahtera dan berdaya saing	Tujuan 1.1: Mewujudkan sumber daya manusia yang sejahtera, berkualitas dan berdaya saing
		Sasaran 1.1.1: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
		Sasaran 1.1.2: Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat
		Sasaran 1.1.3: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
	2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Tujuan 2.1: Meningkatnya pemerataan infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan
		Sasaran 2.1.1: Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur strategis secara berkelanjutan
		Sasaran 2.1.2: Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur dasar secara berkelanjutan
		Sasaran 2.1.3: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		Sasaran 2.1.4: Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana

VISI	Misi	Sasaran Daerah
	3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing	Tujuan 3.1: Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing
		Sasaran 3.1.1: Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah
		Sasaran 3.1.2: Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah
		Sasaran 3.1.3: Meningkatnya ketahanan pangan daerah
	4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Tujuan 4.1: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Sasaran 4.1.1: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
		Sasaran 4.1.2: Meningkatnya kualitas pelayanan public

Sumber : RPJMD 2021-2026

Dari Tabel 2.1 visi dan misi Kepala Daerah, Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur Penunjang urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan yang menjadi kewenangan Kabupaten, mendukung misi ke-4 dengan tujuan Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

B. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan pernyataan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan termuat dalam :

Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Tujuan : Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik.

Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan unsur penunjang, yang tugas pokoknya adalah melaksanakan fungsi Penunjang urusan Pemerintah Bidang Perencanaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Relevansi dan konsistensi antara pernyataan Misi ke-4 Kepala Daerah dengan fungsi Bappeda Litbang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 (Tabel tujuan dan sasaran)

**Tabel 2.2. TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
1	Meningkatnya	Indeks			n/a	n/a	n/a	85.00	90.00	92.00

	kualitas perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan Pembangunan								
1			Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase Sinergi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah	n/a	n/a	n/a	80.00	85.00	90.00
				Persentase kualitas Perencanaan	n/a	n/a	n/a	85.00	87.00	90.00
				Persentase Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	n/a	n/a	n/a	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan	Persentase nilai kematangan inovasi daerah			n/a	n/a	n/a	70.00	72.00	75.00
			Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	60,00	60,00	55,00	60,01	65,01	70,01

Sumber : Penetapan IKU Bappeda Litbang 2024-2026

C. Strategi dan arah kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappeda Litbang mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Adapun Strategi dan arah kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) Berlandaskan CINTA BS (Cerdas, Integritas, iNovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya Saing)		
Misi ke-4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan public yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi.		
Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Kebijakan OPD
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	1. Meningkatkan sinergi Dokumen Perencanaan melalui program Koordinasi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Meningkatkan Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran melalui : - Kegiatan Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah - Kegiatan Perencanaan dan Pendanaan 3. Meningkatkan kualitas kajian perencanaan pembangunan daerah melalui	7. Meningkatkan kesesuaian substansi dalam dokumen Perencanaan (RPJMD dan RPJMN) dengan melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah 8. Mengoptimalkan kesesuaian Program/Kegiatan dan Sub kegiatan, dengan melaksanakan : - pendampingan dan asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 9. Perbaiki kualitas Perencanaan dengan mempertimbangkan kesesuaian isu strategis, dengan berkoordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

		Program Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah.	
Menujudkan capaian kapasitas inovasi daerah	Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi daerah melalui kegiatan Pengembangan Inovasi dan teknologi	Percepatan penumbuhan inovasi daerah dengan terbentuknya Perbup tentang Inovasi Daerah dan melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah pengusung inovasi dengan dibentuknya Klinik Inovasi.

Sumber : Penetapan IKU Bappeda Litbang 2024-2026

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan kinerja yang ingin dicapai untuk mewujudkan kinerja yang baik berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki, maka Bappeda Litbang kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan perjanjian kinerjanya sebagai berikut :

A. Perjanjian Kinerja Pejabat Esselon II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase Sinergi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah	Persen	85,00
		Persentase Kualitas Perencanaan	Persen	87,00
		Persentase Keterhubungan Perencanaan	Persen	100

		Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja		
2	Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah	Indeks inovasi daerah	Indeks	65,01

Dari Perjanjian kinerja Kepala Bappeda Litbang diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan sasaran terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas ditargetkan :

1) persentase Sinergi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah sebesar 85,00% dari bobot 32, 2) Persentase Kualitas Perencanaan sebesar 87,00% dari bobot 58 dan 3) Persentase keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja sebesar 100% dari bobot 10, dalam instrument Indeks Perencanaan Pembangunan.

Sedangkan untuk mewujudkan capaian kapasitas inovasi daerah ditargetkan indeks inovasi daerah sebesar 65,01.

B. Perjanjian Kinerja Pejabat Esselon III

1. Jabatan : Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
	Sasaran Program : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	76,00
	Sasaran Kegiatan :		
1	Optimalnya ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100%
2	Optimalnya ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Keuangan PD	100%

3	Optimalnya ketersediaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi BMD PD	100%
4	Optimalnya ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Kepegawaian PD	100%
5	Optimalnya Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Umum PD	100%
6	Optimalnya Pengadaan BMD Penunjang urusan Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang urusan PD	100%
7	Optimalnya Penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan PD	100%
8	Optimalnya Pemeliharaan BMD Penunjang urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD	100%

Dari Perjanjian Kinerja diatas dapat dijelaskan bahwa target dari sasaran program adalah nilai AKIP Bappeda Litbang sebesar 71,00 dan semua sasaran kegiatan pada program penunjang di targetkan 100%.

2. Jabatan : Kabid Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Sasaran Program: Meningkatnya kualitas perencanaan Kinerja	Nilai Perencanaan Kinerja	NILAI	25,00
	Sasaran Kegiatan: 1. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	1.Persentase konsistensi perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah	%	94,00
	2. Meningkatkan kualitas data dan info pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	2.Persentase updating data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	%	90,00
2.	Sasaran Program:	Nilai Pengukuran Kinerja	NILAI	

	Meningkatnya kualitas pengukuran Kinerja			23,00
	Sasaran Kegiatan: 1. Meningkatkan kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Optimalnya Implementasi sipd di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase capaian indikator kinerja daerah 2. Persentase implementasi sipd di bidang Perencanaan Pembangunan daerah	% %	59,09 100

Pada Perjanjian kinerja Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah untuk sasaran Meningkatkan kualitas Perencanaan Kinerja di targetkan dengan nilai sebesar 25,00 dan untuk sasaran meningkatnya kualitas Pengukuran Kinerja ditargetkan dengan nilai sebesar 23,00.

3. Jabatan : Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Kualitas Perencanaan	51,00
2.	Sasaran Kegiatan : Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	89,50%

Pada Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sasarannya adalah untuk mendukung capaian kinerja kepala Badan yaitu meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah dengan Target Nilai Kualitas

Perencanaan sebesar 51,00, serta mengoptimalkan kesesuaian program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen perencanaan.

4. Jabatan : Kabid Perekonomian, SDA dan Infrastruktur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Sasaran Program : Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Kualitas Perencanaan	51,00
2.	Sasaran Kegiatan : Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	87,15%
3.	Sasaran Kegiatan : Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Infrastruktur	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	93,85%

Seperti halnya pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perekonomian, sda dan Infrastruktur, sasarannya adalah untuk mendukung capaian kinerja kepala Badan yaitu meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah dengan Target Nilai Kualitas Perencanaan sebesar 51,00, serta mengoptimalkan kesesuaian program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen perencanaan.

5. Jabatan : Kabid Penelitian dan Pengembangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Sasaran Program: Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase penelitian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan pembangunan	47,45

	Sasaran Kegiatan : 1. Meningkatnya Kualitas penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan 2. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang social dan kependudukan 3. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	1. Persentase penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dikembangkan 2. Persentase penelitian dan pengembangan bidang social dan kependudukan yang dikembangkan 3. Persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dikembangkan	10,00 15,00 10,00
		Persentase peningkatan Indeks Inovasi Daerah	1,50
	4. Meningkatnya Inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	4. Persentase pertumbuhan inovasi setiap tahun	18,00

Pada Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan, sasarannya adalah untuk mendukung capaian kinerja kepala Badan dalam meningkatkan capaian kapasitas inovasi daerah yaitu meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan dengan Target Persentase Penelitian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan pembangunan sebesar 47,45% dan Persentase peningkatan indeks Inovasi Daerah sebesar 1,50%.

2.3. Rencana Anggaran Perangkat Daerah

A. Target Belanja

Sesuai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, Target Belanja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp. 8.912.914.360, yang terdiri dari :

Tabel 2.4. Belanja pelaksanaan kegiatan Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Output (Keluaran)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	7.034.161.560,-	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	80.800.000,-	
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.500.000,-	Dokumen RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, Renja, Renja Perubahan dan Perubahan Renstra
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.300.000,-	Lakip, LPPD, Lap. Triwulan, Lap Tahunan dan pelaksanaan rapat evaluasi kinerja
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.493.091.720,-	
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.110.708.720,-	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN, Terlaksananya adm pelaksanaan Tugas ASN
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	370.280.000,-	Dokumen laporan keuangan, Terpenuhinya jasa administrasi keuangan
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.103.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.999.950,-	
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.253.000,-	Dokumen BMD SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.435.000,-	
3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21.080.000,-	Dokumen administrasi kepegawaian
4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	42.355.000,-	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	515.262.000,-	
7. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.615.000,-	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.146.000,-	Peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.481.000,-	Tersedianya alat tulis kantor, tersedianya makanan dan minuman
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.000.000,-	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	65.750.000,-	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.270.000,-	Dalam Daerah, Luar Daerah
Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	253.136.680,-	
1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan	253.136.680,-	Tersedianya Kendaraan Operasional penunjang kegiatan
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	183.301.160,-	Tersedianya Peralatan penunjang penyelesaian kerja dan kinerja
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.301.160,-	
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	434.882.000,-	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.643.000,-	
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.319.000,-	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.920.000,-	Terpeliharanya gedung kantor
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.290.000,-	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	601.488.000,-	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	322.554.000,-	
3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	66.000.000,-	Memingkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
4. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	256.554.000,-	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	94.500.000,-	
2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	94.500.000,-	Update data dan informasi pembangunan daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	96.434.000,-	
3. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	44.145.000,-	Meningkatkan pencapaian kinerja program/kegiatan pemerintah daerah
4. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	52.289.000,-	Peningkatan kualitas capaian pelaksanaan rencana pembangunan
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	88.000.000,-	
2. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pemerintah Daerah	88.000.000,-	Tersedianya jumlah data dalam system informasi Pemerintah Daerah Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	996.955.400,-	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	377.083.200,-	
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	72.078.000,-	Tersedianya Dokumen Aksi Stunting
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	42.533.000,-	Tersedianya laporan Hasil Evaluasi PAMSIMAS
9. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.804.000,-	Terlaksananya advokasi indikator SDG's
10. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	47.152.000,-	Jumlah OPD yang di asistensi
11. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	82.441.000,-	Terlaksananya operasional tim TKPKD dan oprasional tim corporate social responsibility (CSR)
12. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	86.075.200,-	Terlaksananya koordinasi pembangunan bidang sosbud
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	266.305.200,-	
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	69.295.200,-	Peningkatan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
7. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	16.095.000,-	Tersediannya Laporan hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Bidang Perekonomian
8. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	107.451.000,-	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA, Laporan gas rumah kaca (GRK), Dokumen RAD pangan dan Gizi, Laporan GRK Kabupaten Bengkulu Selatan
9. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokren Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	19.909.000,-	Tersediannya Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang SDA
10. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	58.555.000,-	Tersediannya Laporan Hasil Verifikasi Bidang

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		SDA
Koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	353.567.000,-	
4. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	184.908.000,-	Terlaksananya pendampingan penyusunan Dokumen Perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang Mitra
5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	14.154.000,-	Tersediannya Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur
6. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	154.505.000,-	Laporan pokja PKP, Peningkatan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang keciptakaryaan dan kewilayahan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	280.309.400,-	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	59.193.000,-	
2. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	59.193.000,-	Laporan analisis indeks daya saing daerah dan penginputan indeks pengelolaan keuangan daerah
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	63.564.000,-	
2. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	63.564.000,-	Berkembangnya varietas unggul lokal kabupaten Bengkulu Selatan
Pengembangan inovasi dan Teknologi	157.552.400,-	
3. Penelitian, Pemhembangan dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	88.632.600,-	Dokumen sistem inovasi daerah, Input indeks daerah, Lomba inovasi IPTEK
4. Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-hasil Kelitbangan	68.919.800,-	Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi

Sumber : APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025

B. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Terkait Belanja penyelenggaraan Program dan Kegiatan, diprioritaskan untuk pencapaian tujuan organisasi, komposisi target belanja dalam APBD Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan masih didominasi oleh Belanja Tidak Langsung yang diperuntukkan untuk mendanai Belanja Pegawai yaitu sebesar Rp. 5.110.708.720,- atau sebesar 57,34% dari total APBD Bappeda Litbang tahun 2025.

Sedangkan Belanja Langsung untuk mendanai pelaksanaan Program dan Kegiatan guna pencapaian sasaran strategis Bappeda Litbang, yang alokasi anggarannya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.5. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Anggaran (Rp.)
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase Sinergi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah	Meningkatnya kualitas perencanaan Kinerja	Nilai Perencanaan Kinerja	505.054.000
		Persentase kualitas perencanaan	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai Kualitas Perencanaan	996.955.400
		Persentase keterhubungan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan kinerja	Meningkatnya kualitas Pengukuran kinerja	Nilai Pengukuran Kinerja	96.434.000
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	1.923.452.840
2	Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase Penelitian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan pembangunan	122.757.000
				Persentase	157.552.000

				peningkatan indeks inovasi daerah	
--	--	--	--	-----------------------------------	--

Alokasi anggaran per sasaran Strategis adalah untuk pencapaian tujuan organisasi sebesar 42,66, yaitu :

1. Sasaran 1, yaitu : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sebesar 39,52%, dengan rincian sbb :
 - Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah : 17,93%
 - Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja : 11,18%
 - Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja : 1,08%
 - Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah : 9,33%
2. Sasaran 2, yaitu : Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah sebesar : 3,14%.

Bab 3 berisikan:

1. *Capaian Indikator Kinerja Utama PD*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja*
3. *Realisasi Anggaran*
4. *Inovasi Perangkat Daerah*
5. *Aktualisasi dan Implementasi Core Values BerAKHLAK*

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Bappeda Litbang bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik.

Berbagai metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauh mana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sebagai ukuran / standar penilaian untuk mengukur terhadap keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja tersebut dapat digunakan *Skala Ordinal*, yaitu :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah

Pengukuran Kinerja dari sasaran strategis dapat dilakukan dengan berbagai metode yang telah dituliskan di atas, yang paling umum yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, dari

target kinerja dari sasaran strategis telah ditetapkan maka dapat diukur kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2. Pencapaian IKU Bappeda Litbang

NO	INDIKATOR KINERJA	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian 2024
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Perencanaan Pembangunan	90,00	84,92	94,35%	92,00	84,92
2	Persentase sinergi dokumen rencana kerja pembangunan daerah dengan rencana kerja pemerintah	85,00%	77,25%	90,88%	90,00%	77,25
3	Persentase kualitas perencanaan	87,00%	86,55%	99,48%	90,00%	86,55
4	Persentase keterhubungan Perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan kinerja	100%	100%	100%	100%	100
5	Persentase nilai kematangan inovasi daerah	72,00%	90,91%	126,26%	92,00%	91,11
6	Indeks Inovasi Daerah	65,01	62,27	90,55%	70,01	54,34

Sumber : Laporan Tahunan Bappeda Litbang 2025

Dari Tabel 3.2 pencapaian Indikator Kineja Utama Bappeda Litbang Tahun 2025, dapat dilihat bahwa semua capaian indikator diatas 90 %. bahkan terdapat 1 (satu) indikator yang pencapaiannya diatas 100 %, yaitu **Persentase nilai Kematangan Inovasi Daerah** yang ditargetkan sebesar 72,00% dengan realisasinya sebesar 90,91%, hal ini memperlihatkan pencapaian sebesar 126,26%.

Dapat dijelaskan untuk persentase Indeks Perencanaan Pembangunan, Persentase Sinergi, Kualitas perencanaan dan keterhubungan dinilai secara mandiri dengan matrik Instrumen Penghitungan IPPN sesuai dengan SE Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2023.

Untuk persentase nilai kematangan Inovasi Daerah yang bersumber dari kematangan atas 55 Inovasi yang diciptakan sepanjang tahun 2025 terdapat 50 inovasi yang kematangan diatas 60 sehingga memperoleh pencapaian 90,91 % disebabkan karena tingkat keterisian indikator Satuan Inovasi Daerah (SID) yang berisikan Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi hingga keberlanjutan suatu inovasi yang merupakan variable dan indikator pada satuan inovasi **sudah dilengkapi dengan baik oleh masing-masing pencipta inovasi**, sehingga pada saat divalidasi oleh Kementrian Dalam Negeri Inovasi yang hasilkan mencapai kematangan lebih dari 60 (kategori Inovatif) sebanyak 50 inovasi.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini evaluasi dan analisis capaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode pertama Penetapan Indikator Kinerja Utama 2024-2026 :

SASARAN 1.1:

“Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui :

- 1 (satu) indikator kinerja program, yaitu nilai kualitas perencanaan mendapatkan angka capaian kinerja sebesar **98,43% dengan predikat “Sangat Tinggi”**.
- 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan, yaitu :
 1. Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia mendapat angka capaian sebesar 102,91%
 2. Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA mendapat angka capaian sebesar 106,46%

3. Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur mendapat angka capaian sebesar 102,43%.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.3. Realisasi Indikator 1 sasaran 1.1

NO	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian s.d 2024 thd Target Kinerja
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Kualitas Perencanaan	n/a	n/a	100,40	51,00	50,20	98,43	52,00	100,40
	Persentase konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	n/a	n/a	100,11	89,50	92,10	102,91	98,40	100,11
	Persentase konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	n/a	n/a	100,71	87,15	86,65	106,46	88,40	100,71
	Persentase konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	n/a	n/a	100,08	93,85	93,08	102,43	94,00	100,08

Sumber : Laporan Tahunan Bappeda Litbang 2025

Berdasarkan data pada tabel 3.4 tersebut, dapat diketahui capaian dari indikator nilai kualitas perencanaan pada tahun 2025 melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu dengan target 51,00 dengan realisasi 50,20 sehingga capaian realisasi sebesar 98,430% dengan predikat “Sangat Tinggi”. Adapun pada sasaran ini, selain pencapaian sasaran program juga terdapat pencapaian sasaran kegiatan, yaitu Tingkat Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada dokumen perencanaan.

Dapat dilihat bahwa dari ketiga bidang yaitu Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA serta Bidang Infrastruktur, capaian tingkat Konsistennya diatas 100%.

Faktor pendorong berhasilnya sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja) kepada Perangkat Daerah
2. Melakukan Koordinasi dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

SASARAN 1.2:

“Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas perencanaan kinerja, melalui :

- 1 (satu) indikator kinerja program, yaitu nilai perencanaan kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sebesar **89,95% dengan predikat “Tinggi”**.
- 2 (dua) indikator kinerja kegiatan, yaitu :
 1. Persentase Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah mendapat angka capaian sebesar **98,27% dengan predikat “Baik”**.
 2. Persentase Updating data dan informasi Pemerintah Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mendapat angka capaian sebesar **100% dengan predikat “Sangat Baik”**.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.4. Realisasi Indikator 1 sasaran 1.2

NO	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian s.d 2025 thd Target Kinerja
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Perencanaan Kinerja	21,19	21,68	22,12	25,00	22,38	89,95	27,00	BELUM TERSEDIA
	Persentase konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	n/a	n/a	98,27	94,00	105,3	112,02	95,00	112,02
	Persentase updating data dan informasi pemerintah daerah bid perencanaan pembangunan	n/a	n/a	100	90,00	90,00	100	100	100

Sumber : Laporan Tahunan Bappeda Litbang 2025

Berdasarkan data pada tabel 3.5 tersebut, dapat diketahui capaian dari indikator nilai perencanaan kinerja pada tahun 2025 meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu capaian tahun 2024 sebesar 22,12 menjadi 22,38. Adapun pada sasaran ini, selain pencapaian sasaran program juga terdapat pencapaian sasaran kegiatan seperti yang tercantum pada tabel. Dapat dilihat bahwa pencapaian dari sasaran ini baik itu sasaran program maupun sasaran kegiatan adalah Sangat Tinggi.

Faktor pendorong berhasilnya sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Pendampingan dalam menyusun cascading dan penetapan target kinerja yang memenuhi kriteria SMART.
2. Melakukan Pendampingan dalam meng-update data pada aplikasi sipd.

Sementara itu, dalam proses penyusunan tahapan perencanaannya Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung proses penyusunan tahapan perencanaan tersebut antara lain :

1. Forum Konsultasi Publik



Gambar 3. 1. Forum Konsultasi Publik

2. Koordinasi dan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah



Gambar 3. 2. Forum Lintas Perangkat Daerah

3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten



Gambar 3. 3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten

4. Pendampingan SIPD kepada Perangkat Desa untuk penginputan usulan Desa



Gambar 3. 4. Pendampingan SIPD

SASARAN 1.3:

“Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas pengukuran kinerja, melalui :

- 1 (satu) indikator kinerja program, yaitu nilai pengukuran kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sebesar **68,95% dengan predikat “sedang”**.
- 2 (dua) indikator kinerja kegiatan, yaitu :
 3. Persentase Pencapaian indikator kinerja daerah mendapat angka capaian sebesar **92,30% dengan predikat “Sangat Baik”**.
 4. Persentase Implementasi sipd pada perencanaan pembangunan daerah mendapat angka capaian sebesar **100% dengan predikat “Sangat Baik”**.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.5. Realisasi Indikator 1 sasaran 1.3

NO	INDIKATOR KINERJA	Capaian n 2022	Capaian n 2023	Capaian n 2024	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian s.d 2025 thd Target Kinerja
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai Pengukuran Kinerja	15,08	15,46	15,65	23,00	15,86	68,95	27,00	68,95
	Persentase pencapaian indikator kinerja daerah	n/a	n/a	n/a	59,09	54,54	92,30	63,63	92,30
	Persentase Implementasi sipd pada perencanaan pembangunan daerah	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100

Sumber : Laporan Tahunan Bappeda Litbang 2025

Berdasarkan data pada tabel 3.6 tersebut, dapat diketahui capaian dari indikator nilai pengukuran kinerja pada tahun 2025 meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu capaian tahun 2024 sebesar 15,65 menjadi 15,86 pada tahun 2025. Adapun pada sasaran ini, selain pencapaian sasaran program juga terdapat pencapaian sasaran kegiatan seperti yang tercantum pada tabel.

Faktor pendorong berhasilnya sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Sudah dibangun aplikasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk mempermudah dan mengefektifkan proses pemantauan progres capaian kinerja level Pemda maupun Perangkat Daerah.
2. Lebih dari 50% indikator kinerja daerah melebihi target yang ditetapkan.
3. Penyusunan Perencanaan sudah 100% menggunakan aplikasi sipd.

SASARAN 1.4:

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, melalui 1 (satu) indikator kinerja program, yaitu nilai

AKIP Perangkat Daerah mendapatkan angka capaian kinerja sebesar **94,08% dengan predikat “Sangat Tinggi”**.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.6. Realisasi Indikator 1 sasaran 1.4

NO	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian s.d 2024 thd Target Kinerja
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,01	74,01	62,05	76,00	71,50	94,08	81,00	94,08

Sumber : Laporan Tahunan Bappeda Litbang 2025

Sasaran 2.

“Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas penelitian dan pengembangan, melalui :

- 2 (dua) indikator kinerja program, yaitu :
 1. Persentase penelitian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan pembangunan mendapatkan angka capaian kinerja sebesar **105,82% dengan predikat “Sangat Tinggi”**.
 2. Persentase peningkatan indeks inovasi daerah mendapatkan angka capaian kinerja sebesar **561,7% dengan predikat “Sangat Tinggi”**
- 4 (empat) indikator kinerja kegiatan, yaitu :
 1. Persentase Penelitian bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dikembangkan mendapat angka capaian sebesar **95,28% dengan predikat “Sangat Tinggi”**.
 2. Persentase Penelitian bidang Sosial dan kependudukan yang dikembangkan mendapat angka capaian sebesar **99,60% dengan predikat “Sangat Tinggi”**.

3. Persentase Penelitian bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dikembangkan mendapat angka capaian sebesar **96,12% dengan predikat “Sangat Tinggi”**.
4. Persentase pertumbuhan inovasi setiap tahun mendapat angka capaian sebesar **116,66% dengan predikat “Sangat Tinggi”**.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.7. Realisasi Indikator 2 sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra 2026	Capaian s.d 2024 thd Target Kinerja
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase penelitian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan pembangunan	n/a	n/a	n/a	47,25	50,00	105,8	47,65	105,8
	Persentase penelitian bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dikembangkan	n/a	n/a	n/a	7,00	6,67	95,26	12,00	95,26
	Persentase penelitian bidang social dan kependudukan yang dikembangkan	n/a	n/a	n/a	10,00	9,96	99,60	20,00	99,60
	Persentase penelitian bidang Ekonomi dan pembangunan yang dikembangkan	n/a	n/a	n/a	8,00	7,96	96,12	12,00	96,12
2	Persentase peningkatan indeks inovasi daerah	n/a	n/a	n/a	1,00	5,617	561,7	2,00	561,7
	Persentase pertumbuhan inovasi setiap tahun	n/a	n/a	n/a	17,65	20,59	116,66	18,10	116,6

Sumber : Laporan Tahunan Bappeda Litbang 2025

Berdasarkan data pada tabel 3.7 tersebut, dapat diketahui capaian dari indikator-indikator Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan pada tahun 2025 dengan predikat “ Sangat Tinggi “.

Faktor pendorong meningkatnya sasaran ini adalah :

1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Inovasi Daerah yang diadakan oleh BPSDM Kemendagri.
2. Melakukan Pembinaan kepada seluruh OPD dalam penginputan Inovasi di Website.
3. Melakukan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat dan ke berbagai daerah guna mendapatkan ilmu yang dapat diterapkan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah untuk sasaran 2, Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan kegiatan antara lain:

Melakukan Pembinaan kepada Seluruh OPD dalam Penginputan Inovasi di website



Kegiatan Pembinaan kepada seluruh OPD ini merupakan tahap awal untuk memberikan informasi dan persiapan dalam melengkapi dokumen dan data yang harus dilengkapi dan di upload di website, kegiatan ini berlangsung selama 2 Minggu berdasarkan draft OPD yang diundang per harinya. Kegiatan ini dilakukan di bidang Litbang.

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya pada pencapaian kinerja (Tujuan dan Sasaran Bappeda Litbang tahun 2025) pada table berikut :

Tabel 3.8. Pencapaian Kinerja dan Serapan Anggaran Tujuan/Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase Sinergi Dokumen Rencana Kerja Pembanguna Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah	90,88	98,95	-8,07
		Persentase Kualitas Perencanaan	99,48	98,09	1,39
		Persentase keterhubungan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan kinerja	100	95,04	4,96
3.	Meningkatnya capaian kapasitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	95,78	98,38	-2,60

Sumber : Diolah oleh Tim Penyusunan LKj Bappeda Litbang

Keterangan :

- Capaian Kinerja : Realisasi Indikator / Target Indikator x 100%
- Penyerapan Anggaran : Realisasi Keuangan Program/Kegiatan yang mendukung Indikator
- Tingkat Efisiensi : Capaian Kinerja – Penyerapan Anggaran

Pada pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025, berdasarkan Tabel 3.9

diasas, walaupun tingkat efisien penyerapan anggaran atas capaian kinerja terjadi in efisien akan tetapi pada pencapaian sasaran strategis adalah memuaskan yang terlihat dari Pencapaian Indikator dengan Kriteria “Sangat Tinggi” dan Pencapaian Indikator Indeks Inovasi Daerah dengan Kriteria “Sangat Tinggi”.

Secara keseluruhan, dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Bappeda Litbang melaksanakan 4 program dan 18 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2025 adalah realisasi fisik sebesar 100%, dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program/Kegiatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	7.034.161.560	100	95,04	EFISIEN
1.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.800.000	100	98,89	Efisien
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.493.091.720	100	95.23	Efisien
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.253.950	100	98.53	Efisien
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.435.000	100	82,86	Efisien
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	515.262.000	100	98,48	efisien
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	183.301.160	100	90,48	efisien

7.	Pengadaan Barang Milik Daerah	253.136.680	100	98,89	Efisien
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.882.000	100	89.20	Efisien
B.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	601.488.000	100	98,95	EFISIEN
1.	Pemyusunan Perencanaan dan Pendanaan	322.554.000	100	99.16	efisien
2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	94.500.000	100	98,71	efisien
3.	Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	96.434.000	100	99.14	efisien
4.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	88.000.000	100	98,26	Efisieni
C.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	996.955.400	100	98,09	EFISIEN

1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	377.083.200	100	96.55	Efisien
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	266.305.200	100	98.19	Efisien
3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	353.567.000	100	99.65	Efisien
D.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	280.309.400	100	98,38	EFISIEN
1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	59.193.000	100	97.98	efisien
2.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	63.564.000	100	98.72	efisien
3.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	157.552.400	100	98.40	efisien
	Jumlah	8.912.914.360	100	95.75	Efisien

Sumber : Laporan Tahunan Bappeda Litbang tahun 2025.

Keterangan :

- Capaian Kinerja : Realisasi Indikator / Target Indikator x 100%
- Penyerapan Anggaran : Realisasi Keuangan Program/Kegiatan yang mendukung Indikator
- Tingkat Efisiensi : Capaian Kinerja – Penyerapan Anggaran

Secara keseluruhan pada tabel 3.10 diatas dapat dilihat bahwa dari sisi penggunaan anggaran Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025 telah melaksanakan Program dan Kegiatan dengan capaian memuaskan yang terlihat dari pencapaian kinerja 100% dengan tingkatan efisiensi yang efisien.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Sesuai RAPBD tahun anggaran 2025 Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan mengelola anggaran sebesar Rp. 8.912.914.360,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.110.708.720,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.472.714.760,00, serta Belanja Modal sebesar Rp. 329.490.880,00. Belanja Pegawai digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan, Belanja Modal digunakan untuk pengadaan 11 (sebelas) unit Laptop sebagai Sarana Penunjang Kerja dan Pencapaian Kinerja, 1 (satu) unit AC guna melengkapi gedung Mushola Bappeda Litbang, Sound Sistem sebagai penjang Kerja serta Sarana dan Prasarana Kerja lainnya, sedangkan Belanja Barang dan Jasa digunakan membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan. Realisasi keuangan belanja urusan penunjang sebesar 95,04% dengan penyerapan dana sebesar Rp 7.034.161.560,00.

Tabel 3.10. Realisasi Belanja pelaksanaan kegiatan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Dana Kegiatan			Output (keluaran)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian(%)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	7.034.161.560,-	6.685.363.734,-	95.04	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.800.000,-	79.906.445,-	98.89	
5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.500.000,-	38.084.322,-	98.92	Dokumen Renja, Renja Perubahan dan Perubahan Renstra, RKA/DPA SKPD
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.300.000,-	41.822.123,-	98.87	Lakip, LPPD, Lap. Triwulan dan Lap Tahunan, laporan MRI
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.493.091.720,-	5.231.243.859,-	95.23	

7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.110.708.720,-	4.862.022.665,-	95.13	Dokumen laporan keuangan, Terpenuhi nya jasa administrasi keuangan
8. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	370.280.000,-	357.280.000,-	96.49	Dokumen laporan keuangan, Terpenuhi nya jasa administrasi keuangan
9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.103.000,-	11.941.194,-	98.66	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.253.000,-	10.102.281,-	98.53	
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.253.000,-	10.253.000,-	98.53	Dokumen BMD SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.435.000,-	52.560.771,-	82.86	
5. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21.080.000,-	20.917.771,-	99.23	Dokumen administrasi kepegawaian
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	42.355.000,-	31.643.000,-	74.71	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	515.262.000,-	507.425.963,-	98.48	
13. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.615.000,-	13.111.055,-	96.30	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
14. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.146.000,-	56.165.250,-	93.38	Peralatan dan perlengkapan kantor
15. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.481.000,-	91.535.220,-	96.88	Tersedianya alat tulis kantor, tersedianya makanan dan minuman
16. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.000.000,-	26.694.979,-	98.87	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	65.750.000,-	65.650.000,-	99.85	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.270.000,-	254.269.459,-	99.99	Dalam Daerah, Luar Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang bUrusan Pemerintah Daerah	253.136.680,-	250.335.995,-	98.89	
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	253.136.680,-	250.335.995,-	98.89	Dokumen administrasi kepegawaian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.301.160,-	165.582.172,-	90.48	
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.301.160,-	165.582.172,-	90.48	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.882.000,-	387.936.248,-	89.20	
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	297.643.000,-	253.610.248,-	85.21	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.319.000,-	85.176.000,-	98.68	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.920.000,-	49.150.000,-	96.52	Terpeliharanya Gedung Kantor
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	601.488.000,-	595.180.235,-	98.95	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	322.554.000,-	319.829.181,-	99.16	
5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	66.000.000,-	65.258.958,-	98.88	Memingkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
6. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	256.554.000,-	254.570.223,-	99.23	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				pembangunan daerah
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	94.500.000,-	93.279.445,-	98.71	
3. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	94.500.000,-	93.279.445,-	98.71	Update data dan informasi pembangunan daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	96.434.000,-	95.604.342,-	99.14	
5. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	44.145.000,-	43.660.085,-	98.91	Meningkatkan pencapaian kinerja program/kegiatan pemerintah daerah
6. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	52.289.000,-	51.944.257,-	99.34	Peningkatan kualitas capaian pelaksanaan rencana pembangunan
Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Pembangunan Daerah	88.000.000,-	86.467.267,-	98.26	
1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	88.000.000,-	86.467.267,-	98.26	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	996.955.400,-	977.896.965,-	98.09	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	377.083.200,-	364.080.641,-	96.55	
13. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	72.078.000,-	69.041.782,-	95.79	Tersedianya Dokumen Aksi Stunting
14. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	42.533.000,-	41.852.960,-	98.40	Tersedianya laporan Hasil Evaluasi PAMSIMAS
15. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.804.000,-	45.975.192,-	98.23	Terlaksananya advokasi indikator SDG's
16. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	47.152.000,-	46.636.032,-	98.91	Jumlah OPD yang di asistensi
17. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	82.441.000,-	76.203.774,-	92.43	Terlaksananya operasional tim TKPKD dan oprasional tim corporate social responsibility (CSR)
18. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	86.075.200,-	84.370.901,-	98.02	Terlaksananya koordinasi pembangunan bidang sosbud
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	266.305.200,-	261.473.387,-	98.19	
11. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	69.295.200,-	68.487.698,-	98.83	Peningkatan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
12. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	16.095.000,-	15.927.604,-	98.96	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD Bidang Perekonomian

13. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	102.451.000,-	101.343.548,-	98.92	Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA, Laporan gas rumah kaca (GRK), Dokumen RAD pangan dan Gizi, Laporan GRK Kabupaten Bengkulu Selatan
14. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	19.909.000,-	19.417.815,-	97.53	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
15. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	58.555.000,-	56.296.722,-	96.14	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA
Koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	353.567.000,-	352.342.937,-	99.65	
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	184.908.000,-	184.816.045,-	99.95	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
8. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	14.154.000,-	14.043.800,-	99.22	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
9. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	154.505.000,-	153.483.092,-	99.43	Laporan pokja PKP, Peningkatan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang keciptakaryaan dan kewilayahan
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	280.309.400,-	275.779.582,-	98.38	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	59.193.000,-	57.995.006,-	97.98	
3. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	59.193.000,-	57.995.006,-	97.98	Laporan analisis indeks daya saing daerah dan penginputan indeks pengelolaan keuangan daerah
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	63.564.000,-	62.748.248,-	98.72	
3. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	63.564.000,-	62.748.248,-	98.72	Berkembangnya varietas unggul lokal kabupaten Bengkulu Selatan
Pengembangan inovasi dan Teknologi	157.552.400,-	155.036.328,-	98.40	
5. Penelitian, Pemhembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	88.632.600,-	88.270.828,-	99.59	Dokumen sistem inovasi daerah, Input indeks daerah, Lomba inovasi IPTEK
6. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	68.919.800,-	66.765.500,-	96.87	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

3.4 Inovasi Perangkat Daerah

Untuk mendukung pencapaian Kinerja Bappeda Litbang, berikut beberapa inovasi yang telah dilakukan :

1. SIPDA (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)

Adapun tujuan dan Manfaat inovasi SIPDA adalah untuk mempermudah melaksanakan tugas menyusun evaluasi dan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta dapat mengetahui sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan melalui input realisasi anggaran sehingga mudah dalam melaksanakan penyusunan evaluasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam hal ini RKPD.

Dengan adanya inovasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Daerah akan lebih termonitoring, sebagaimana telah diterapkan bahwa setiap triwulan setiap Perangkat Daerah melaporkan realisasi fisik dan keuangan melalui aplikasi sipda, sehingga lebih mudah memonitor dan meningkatkan kualitas pengukuran Kinerja.

2. WARUNG PPM (Wadah dan Ruang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)

Tujuan dan manfaat yang diperoleh dengan dibangun inovasi Warung PPM, antara lain:

- a. Terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi, sinergi dan asistensi antar perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Terbangunnya sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu dan komprehensif.
- c. Tersedianya Informasi data yang akurat dan tepat sasaran berdasarkan objek yang ditetapkan dalam Warung PPM.

Adanya Inovasi Wadah dan Ruang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, memberikan dampak lebih pada

penyusunan Dokumen Perencanaan, sehingga kualitas Dokumen Perencanaan akan meningkat.

3. KLINIK INOVASI

Maksud dari Klinik Inovasi adalah memberikan Pendampingan dalam menumbuhkan budaya inovasi baik pada Pemerintah Daerah maupun masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.

Yang bertujuan untuk :

1. Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi Inovasi OPD
2. Melakukan Pendampingan dalam Pengembangan Inovasi OPD
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Inovasi OPD.

Seiring dengan berjalannya inovasi klinik inovasi yang terus digiatkan oleh Bidang Litbang Bappeda Litbang berupa mengasistensi Perangkat Daerah dalam membangun Inovasi daerah dilingkungan Perangkat Daerah, Tingkat Kematangan Inovasi terus membaik dan meningkatkan indeks Inovasi pada saat penilain IGA.

4. LEGENDA (Litbang Eksplorasi Genetik Daerah)

Tujuan dibangunnya Inovasi Legenda adalah agar Terlaksananya eksplorasi Sumber Daya Genetik lokal yang komprehensif, akseleratif, intensif dan sinergi dari semua pemangku kepentingan (Bidang Litbang Bappeda, Dinas Pertanian, BPP dan BPTP), sehingga diharapkan Manfaat Yang Diperoleh yaitu Peningkatan secara signifikan peluang diperolehnya SDG lokal yang potensial untuk didaftarkan.

5. SENANG KASIH (Sistem Penanganan Kemiskinan Terintegrasi)

Terdapat 3 tujuan dibangunnya inovasi SENANG KASIH, yaitu :

- a. Jangka Pendek : Tersedianya system penanggulangan kemiskinan terintegrasi

- b. Jangka Menengah : Penyusunan basis data kemiskinan yang akurat
- c. Jangka Panjang : Angka Kemiskinan di Bengkulu Selatan menurun dibawah angka kemiskinan propinsi dan kabupaten.

6. AKSI PSI (Asistensi, Koordinasi, Sinergitas Harmonisasi Bidang PSI)

Tujuan dibangunnya Inovasi AKSI PSI adalah untuk menyiapkan wadah/ruang khusus yang menangani kepentingan dan kelancaran arus informasi dan koordinasi bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

7. SIMENTIK (Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Internal Kinerja)

Sejalan dengan amanat PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP, yang mengharapkan dimana pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan teknologi. Untuk meaksimalkan pengukuran kinerja melalui Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai dilingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, perlu di dukung oleh berbagai macam inovasi, untuk itu Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan membangun inovasi daerah dengan nama Aplikasi SIMENTIK.

Yang bertujuan untuk memudahkan onitoring dan Evaluasi Internal Kinerja Pegawai dilingkungan Bappeda Litbang.

Inovasi SIMENTIK Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan diharapkan dapat menghasilkan keluaran dan dampak positif bagi peningkatan pencapaian target kinerja terhadap pengukuran kinerja Pegawai dilingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

3.5 Aktualisasi dan Implementasi core values BerAKHLAK

Dalam rangka pembentukan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional dalam melaksanakan pelayanan public, serta memiliki nilai-nilai inti ASN yang sama dalam memperkuat budaya kerja, maka Bappeda Litbang telah memberikan arahan agar seluruh Pegawai dilingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan mengimplementasikan core value (Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam internalisasi core value di lingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sepanjang tahun 2025, diantaranya :

1. Kepala OPD menetapkan Tim Budaya Kerja
2. Menyusun Rencana Aksi Internalisasi BerAKHLAK
3. Melakukan Penandatanganan Komitmen bersama penerapan budaya kerja BerAKHLAK
4. Sosialisasi berkala BerAKHLAK, yang dilakukan dengan pembacaan BerAKHLAK pada setiap Senin I, setiap bulan.
(<https://acesse.one/lhpKf>)
5. Pemasangan Banner (Terlampir)
6. Pembuatan Pin BerAKHLAK, yang dipakai setiap ASN dilingkungan Bappeda Litbang. (Terlampir)
7. Pembuatan Video BerAKHLAK. (<https://l1nk.dev/oikEB>)

BAB IV**PENUTUP**

Bab 4 Berisikan :

1. *Kesimpulan*
2. *Saran dan Rekomendasi*

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Program dan Kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Penyusunan LKj juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2024 yang dituangkan menjadi 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja utama kepala Bappeda Litbang. Indikator kinerja mengalami perubahan sesuai dengan rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Bappeda Litbang tahun 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan. Laporan Kinerja (LKj) juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Capaian Kinerja berupa Perjanjian Kinerja (PK). Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah untuk melakukan pengumpulan capaian kinerja

data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan Pembentukan Tim Penyusunan.

Dalam Pencapaian Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025 secara umum tujuan, Program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan sangat baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Laporan Kinerja Bappeda Litbang Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja tahun 2025 dan Renstra 2021-2026 dikategorikan **"SANGAT TINGGI"**. Kategori Sangat Tinggi tingkat capaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025, kecuali indikator Nilai perencanaan Kinerja dan nilai pengukuran kinerja, yang sampai laporan ini disusun LHE SAKIP Kabupaten sebagai sumber data indikator berkenaan belum tersedia. Hasil yang telah dicapai di tahun 2025 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya system kerja di lingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergi satu sama lainnya.

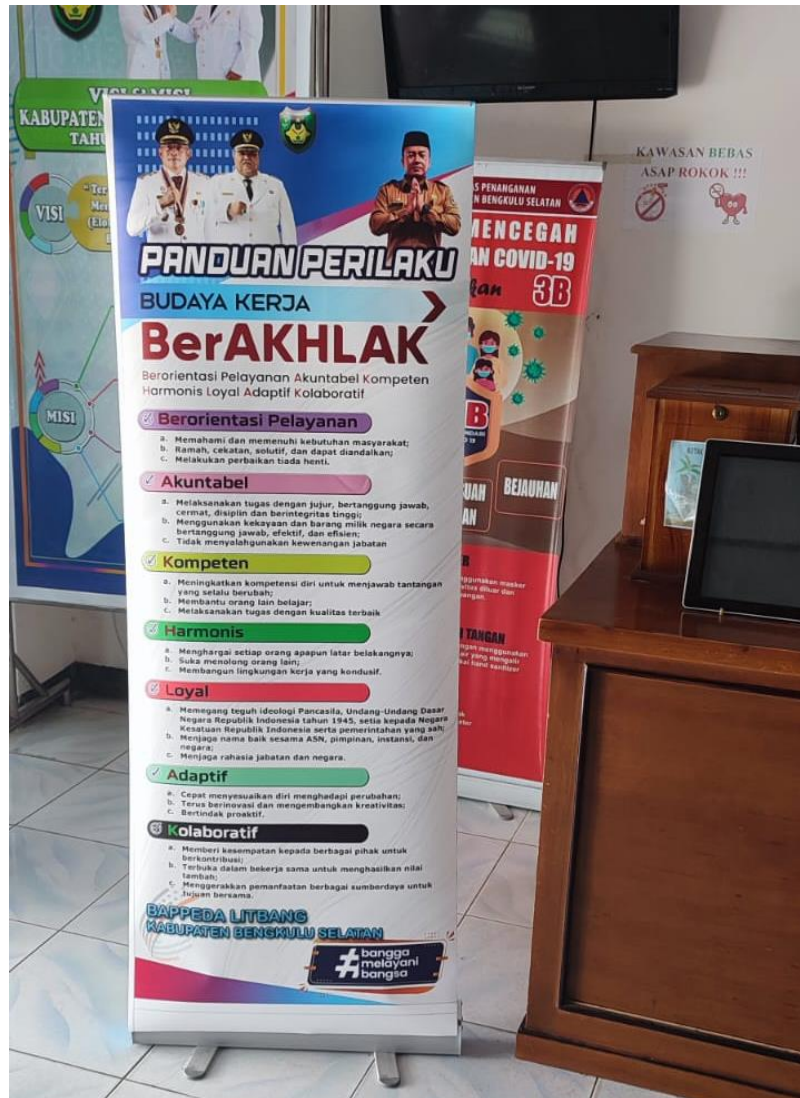
4.2 Saran dan Rekomendasi

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendala-kendala teknis yang perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain adalah :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program/kegiatan di Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKj.
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja dilingkungan Pemerintahan khususnya di Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.

LAMPIRAN

Standing Banner BerAKHLAK



Penggunaan PIN BerAKHLAK



PERJANJIAN KINERJA



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA LITBANG)

Jl. Affan Bachsin Telpon/Fax. (0739) 21475, email : bappeda@bengkuluselatankab.go.id, Manna

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **FIKRI ALJAUHARY, S.STP, M.M**

Jabatan : Kepala Badan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **GUSNAN MULYADI, SE., MM**

Jabatan : Bupati Bengkulu Selatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji dengan sungguh – sungguh kepada pihak kedua :

1. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, Program Dan Sasaran Serta Target Kinerja Pemerintah Daerah, berkomitmen untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi kewenangan sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diemban sebagaimana tertuang, pada Lampiran I Perjanjian ini.
2. Berkomitmen mewujudkan perjanjian kerja tambahan untuk percepatan implementasi Reformasi Birokrasi menuju *good government* dan *clean govermance* sebagaimana tertuang pada lampiran II perjanjian ini.
3. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan kami siap menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manna, 16 Januari 2025

Pihak Kedua :

Bupati Bengkulu Selatan

Gusnan Mulyadi, S.E., M.M.

Pihak Pertama,

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan

Fikri Aljahary, S.STP., M.M.
NIP 198210012001121002

LAMPIRAN I : PERJANJIAN KINERJA

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Bengkulu Selatan

Nomor : 000.7/11/Bappeda-Litbang/I/2025

Tanggal : 16 Januari 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

OPD : Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Nilai	90,00
2	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Persentase Sinergi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah	Persentase	85,00
3	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Persentase Kualitas Perencanaan	Persentase	87,00
4	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Persentase Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	Persentase	100
5	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	Persentase Nilai Kematangan Inovasi Daerah	Persentase	72,00
6	Meningkatnya Capaian Kapasitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	65,01

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.423.282.300,-	APBD
2. Program Perencanaan, Penendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 794.000.000,-	APBD
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.301.200.000,-	APBD
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 499.000.000,-	APBD

Pihak Kedua :

Bupati Bengkulu Selatan

Gusnan Mulyadi, S.E., M.M.

Pihak Pertama,

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan

Fikri Satrio Nugro, S.STP., M.M.

NIP 198210012001121002

LAMPIRAN II : PERJANJIAN KINERJA TAMBAHAN
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor : 000.7/11/Bappeda-Litbang/I/2025
Tanggal : 16 Januari 2025

**PERJANJIAN PEJABAT STRUKTURAL UNTUK
PENCAPAIAN TARGET KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

NO	URAIAN	TARGET	KETERANGAN
1	Penguatan AKIP pada PD	BB	
	1) Perencanaan kinerja	24	Dari bobot 30
	2) Pengukuran kerja	24	Dari bobot 30
	3) Pelaporan kinerja	12	Dari bobot 15
	4) Evaluasi kinerja	20	Dari bobot 25
2	Jumlah inovasi yang dibangun dan dikembangkan	Minimal 1 Inovasi	Terimplementasi dengan baik
3	Penerapan dan evaluasi SPIP pada PD	Level 3	Laporan pelaksanaan SPIP
4	Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Level 3	Laporan implementasi MRI
5	Terkelolanya data sektoral Perangkat Daerah	100%	pemenuhan elemen data sektoral
6	Tata Kelola dan tindak lanjut pemeriksaan keuangan PD	TL 100%	Tindak lanjut temuan pemeriksaan keuangan
7	Ketertiban Manajemen BMD	100 %	Rekonsiliasi aset
8	Realisasai Pelaksanaan Program / Kegiatan Perangkat Daerah		Laporan Setiap Triwulan
	1) Sumber Dana APBD	100%	
9	Partisipasi dalam Agenda Pemerintah		Evaluasi per triwulan
	1) Rapat penting DPRD	100%	
	2) Rapat penting kedinasasan	100%	
10	Penerapan dan pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100%	

Pihak Kedua,
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Gusnan Mulyadi, S.E., M.M.

Pihak Pertama,
Kepala Badan Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan

Fikri Alghazali, STP., M.M.
NIP 198210012001121002



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA LITBANG)**

JL Affan Bachsin Telp/Fax. (0739) 21475, email: bappedabengkuluselatan@yahoo.com, Manna
Webside: bappeda.bengkuluselatankab.go.id Email: bappedabengkuluselatan@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ZUMEILDA SARI, S.E., M.E.**

Jabatan : Plt. Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **FIKRI ALJAUHARY, S.STP., M.M.**

Jabatan : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manna, /6 Januari 2025

Pihak Pertama,
Plt. Sekretaris

Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

Pihak Kedua,

Kepala



Fikri Aljauhary S.STP., M.M.
NIP 198210012001121002

Lampiran : Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Bappeda Litbang dengan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
 Nomor : 000.7/11/Bappeda-Litbang/II/2025
 Tanggal : 16 Januari 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Jabatan : Plt. Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
 Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	76,00
2.	Optimalnya ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
3.	Optimalnya ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
4.	Optimalnya ketersediaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%
5.	Optimalnya ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
6.	Optimalnya ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
7.	Optimalnya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%
8.	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
9.	Optimalnya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%

Program/Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran

Rp 89.000.000,-
 Rp 6.862.653.140,-
 Rp 14.981.000,-
 Rp 84.335.000,-
 Rp 615.073.000,-



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA LITBANG)**

JL Affan Bachsin Telpon/Fax. (0739) 21475, email: bappedabengkuluselatan@yahoo.com, Manna
Webside: bappeda.bengkuluselatankab.go.id Email: bappedabengkuluselatan@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **NUSADIAN ESA PUTRA, S.T, M.E**

Jabatan : Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **FIKRI ALJAUHARY, S.STP.,M.M**

Jabatan : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manna, /6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala

Fikri Aljauhary, S.STP., M.M.
NIP 198210012001121002

Pihak Pertama,

Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

Nusadian Esa Putra, S.T., M.E.
NIP 197705241997021001

Lampiran : Perjanjian Kinerja antara Kabid P2EPD
dengan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten
Bengkulu Selatan
Nomor : 000.7/11/Bappeda-Litbang/I/2025
Tanggal : 16 Januari 2025

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Jabatan : Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	Nilai Perencanaan Kinerja	25,00
2.	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	94,00
3.	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Updating Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	90,00
4.	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja	Nilai Pengukuran Kinerja	23,00
5.	Meningkatnya kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Indikator Makro Daerah	59,09
6.	Optimalisasi Implementasi SIPD di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi SIPD di Bidang Pembangunan Daerah	100

Program/Kegiatan	Anggaran
1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
- Keg. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Rp. 435.000.000,-
- Keg. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 140.000.000,-
- Keg. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 155.000.000,-
- Implemmentasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Bidang Pembangunan Daerah	Rp. 64.000.000,-
Jumlah	Rp 794.000.000,-

Pihak Kedua,
Kepala
Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Fikri Aljaunary, S.STP., M.M.
NIP 198210012001121002

Manna, 16 Januari 2025
Pihak Pertama,
Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan

Nusadian Esa Putra, S.T., M.E.
NIP 197705241997021001



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA LITBANG)**

JL Affan Bachsin Telpon/Fax. (0739) 21475, email: bappedabengkuluselatan@yahoo.com,
Manna

Website: bappeda.bengkuluselatankab.go.id Email: bappedabengkuluselatan@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **DWI PRIAN DONA, ST., ME**

Jabatan : Kabid Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **FIKRI ALJAUHARY, S.STP.,M.M**

Jabatan : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manna, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,

Kepala

Fikri Aljauhary, S.STP., M.M.
NIP 198210012001121002

Pihak Pertama,

Kabid. Perekonomian, SDA dan
Infrastruktur


Dwi Prian Dona, S.T., M.E.
NIP 198506162010011014

Lampiran : Perjanjian Kinerja antara Kabid
Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
dengan Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor : 000.7/11/Bappeda-Litbang/II/2025
Tanggal : 16 Januari 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Jabatan : Kabid Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Kualitas Perencanaan	51,00
2.	Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	87,15%
3.	Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Infrastruktur	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur	93,85%

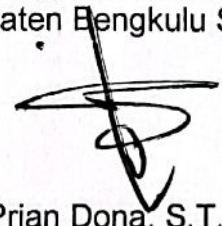
Program	Anggaran
- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp. 378.800.000,-
- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Rp. 271.400.000,-

Jumlah **Rp 650.200.000,-**

Pihak Kedua,
Kepala
Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan


Fikri Aljahary S.STP., M.M.
NIP 198210012001121002

Manna, 16 Januari 2025
Pihak Pertama,
Kabid. Penelitian dan Pengembangan
Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan


Dwi Prian Dona, S.T., M.E.
NIP 198506162010011014



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA LITBANG)**

JL Affan Bachsin Telp/Fax. (0739) 21475, email: bappedabengkuluselatan@yahoo.com,
Manna

Website: bappeda.bengkuluselatankab.go.id Email: bappedabengkuluselatan@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **YEMMI FITRIANI, S.T., M.Si.**

Jabatan : Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **FIKRI ALJAUHARY, S.STP., M.M.**

Jabatan : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manna, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala

Fikri Aljauhary, S.STP., M.M.
NIP 198210012001121002

Pihak Pertama,
Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia

Yemmi Fitriani, S.T., M.Si.
NIP 198201252009012009

Lampiran : Perjanjian Kinerja antara Kabid. Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia dengan Kepala
Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu
Selatan
Nomor : 000.7/11/Bappeda-Litbang/II/2025
Tanggal : 16 Januari 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Jabatan : Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Kualitas Perencanaan	51,00
2.	Optimalisasi kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada DokRen (RPJMD-RKPD, Renstra-Renja, Renja-RKA) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	89,50%

KEGIATAN

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan
Manusia

Jumlah

ANGGARAN

Rp 651.000.000

Rp 651.000.000

Pihak Kedua,
Kepala
Bappeda Litbang
Kkabupaten Bengkulu Selatan



Fikri Aljauhari, S.STP., M.M.
NIP 198210012001121002

Manna, 16 Januari 2025
Pihak Pertama,
Kabid. PPM
Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan

Yemmi Fitriani, S.T., M.Si.
NIP 198201252009012009



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA LITBANG)**

JL Affan Bachsin Telp/Fax. (0739) 21475, email: bappedabengkuluselatan@yahoo.com, Manna
Website: bappeda.bengkuluselatankab.go.id Email: bappedabengkuluselatan@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **BUDI SYAHPUTRA, S.KM., M.Si**
Jabatan : Kabid Penelitian dan Pengembangan
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **FIKRI ALJAUHARY, S.STP, M.M**
Jabatan : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manna, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,
Kabid. Penelitian dan Pengembangan



Fikri Aljauhary, S.STP., M.M.
NIP 198210012001121002

Budi Syahputra, S.KM., M.Si.
NIP 197705241997021001

Lampiran : Perjanjian Kinerja Perubahan antara Kabid
Penelitian dan Pengembangan dengan Kepala
Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor : 000.7/11/Bappeda-Litbang/I/2025
Tanggal : 16 Januari 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Jabatan : Kabid Penelitian dan Pengembangan
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase Penelitian yang Dimanfaatkan untuk Perumusan Kebijakan Pembangunan	47,45%
2.	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dikembangkan	10,00%
3.	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dikembangkan	15%
4.	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dikembangkan	10,00%
5.	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase Peningkatan Indeks Inovasi Daerah	1,50%
6.	Meningkatnya Inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Pertumbuhan Inovasi setiap tahun	18,00%

Program/Kegiatan	Anggaran
1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
- Keg. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp. 113.000.000,-
- Keg. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp. 113.000.000,-
- Keg. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp. 278.000.000,-
Jumlah	Rp 504.000.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Fikri Aljahary, S.STP., M.M.
NIP 198210012001121002

Manna, 16 Januari 2025
Pihak Pertama,
Kabid. Penelitian dan Pengembangan
Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan

Budi Syaputra, S.KM., M.Si.
NIP 1977241997021001



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA-LITBANG)**

Jl. Affan Bachsin Telpon/Fax. (0739) 21475, email : bappeda@bengkuluselatankab.go.id, Manna

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **AHADI SOMAD SYAHLAN, ST.MM**

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : **ZUMEILDA SARI, S.E., M.M.**

Jabatan : Plt. Sekretaris

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manna, /6 Januari 2025

Pihak Kedua,

Plt. Sekretaris



Zumelida Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

Pihak Pertama,

Kasubag Umum Dan Kepegawaian

Ahadi Somad Syahlan, S.T., M.M.
NIP 19910526 2019031004

Lampiran : Perjanjian Kinerja antara Kasubag Umum
Dan Kepegawaian dengan Plt. Sekretaris
Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu
Selatan

Nomor : 000.7/11/Bappeda-Litbang/I/2025

Tanggal : 16 Januari 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	54 Dokumen
2.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang
3.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket
4.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket
5.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	723 Paket
6.	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30.000 Paket
7.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6.600 Dokumen
8.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265 Laporan
9.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit
10.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
11.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit

12.	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
19.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	52 Unit

KEGIATAN/Sub. Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 55.000.000
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 34.000.000
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 6.272.483.140
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 572.880.000
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir SKPD	Rp. 17.290.000
6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 14.981.000
7. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 12.000.000
8. Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 72.355.000
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Rp. 19.438.000
10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 51.606.000
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 91.368.000
12. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Rp. 30.000.000
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 90.000.000
14. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 332.661.000
15. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Rp. 163.116.000
16. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Rp. 244.947.160
17. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 252.418.000
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Lainnya	Rp. 72.968.000
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 23.770.000

Jumlah

Rp 8.423.282.300

Pihak Kedua,

Plt. Sekretaris Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan



Zumeilda Sari, S.E., M.E.
NIP 197506272002122004

Manna, /6 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kasubag Umum Dan Kepegawaian
Bappeda Litbang Kabupaten
Bengkulu Selatan

Ahadi Somad Syahlan, S.T., M.M.
NIP 19910526 2019031004

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

**REALISASI ANGGARAN APBD TRIWULAN IV
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja		Rencana Kinerja Perubahan		Realisasi Kinerja				Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan				9.632.688.500		8.912.914.360			8.534.220.516	95,75	
XX.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.837.729.700		7.034.161.560			6.685.363.734	95,04	
XX.XX.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			64.156.000		80.800.000			79.906.445	98,89	
XX.XX.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	38.500.000	11	38.500.000	11 Dokumen	100,00	38.084.322	98,92	
XX.XX.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	25.656.000	6	42.300.000	6 Laporan	100,00	41.822.123	98,87	Laporan tersedia : 1. Laporan Tahunan 2. LKj 3. Laporan Hasil Monev
XX.XX.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.697.496.540		5.493.091.720			5.231.243.859	95,23	
XX.XX.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	616 Orang/bulan	6.272.513.540	616	5.110.708.720	616 Orang/bulan	100,00	4.862.022.665	95,13	
XX.XX.01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	412.880.000	12	370.280.000	12 Dokumen	100,00	357.280.000	96,49	
XX.XX.01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	12.103.000	15	12.103.000	15 Laporan	100,00	11.941.194	98,66	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja		Rencana Kinerja Perubahan		Realisasi Kinerja				Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	
XX.XX.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.253.000		10.253.000			10.102.281	98,53	
XX.XX.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan	10.253.000	15	10.253.000	15 Laporan	100,00	10.102.281	98,53	
XX.XX.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			50.755.000		63.435.000			52.560.771	82,86	
XX.XX.01.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	8.400.000	12	21.080.000	12 dokumen	100,00	20.917.771	99,23	
XX.XX.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	42.355.000	2	42.355.000	2 Orang	100,00	31.643.000	74,71	
XX.XX.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			406.475.000		515.262.000			507.425.963	98,48	
XX.XX.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	13.615.000	11	13.615.000	11 Paket	100,00	13.111.055	96,30	
XX.XX.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	51.606.000	13	60.146.000	13 Paket	100,00	56.165.250	93,38	
XX.XX.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	65 Paket	72.204.000	65	94.481.000	65 Paket	100,00	91.535.220	96,88	
XX.XX.01.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	21.000.000	10	27.000.000	10 Paket	100,00	26.694.979	98,87	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja		Rencana Kinerja Perubahan		Realisasi Kinerja				Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	
XX.XX.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6600 Dokumen	50.000.000	6600	65.750.000	6600 Dokumen	100,00	65.650.000	99,85	
XX.XX.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155 Laporan	198.050.000	155	254.270.000	155 Laporan	100,00	254.269.459	100,00	
XX.XX.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			86.213.000		253.136.680			250.335.995	98,89	
XX.XX.01.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	86.213.000	6	253.136.680	6 unit	100,00	250.335.995	98,89	
XX.XX.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			246.193.160		183.301.160			165.852.172	90,48	
XX.XX.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	246.193.160	12	183.301.160	12 Laporan	100,00	165.852.172	90,48	
XX.XX.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			276.188.000		434.882.000			387.936.248	89,20	
XX.XX.01.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 unit	252.418.000	23	297.643.000	23 unit	100,00	253.610.248	85,21	
XX.XX.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	2 Unit	86.319.000	2 Unit	100,00	85.176.000	98,68	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja		Rencana Kinerja Perubahan		Realisasi Kinerja				Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	
XX.XX.01.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	23.770.000	52	50.920.000	52 Unit	100,00	49.150.000	96,52	
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			537.988.000		601.488.000			595.180.235	98,95	
05.01.02.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			322.554.000		322.554.000			319.829.181	99,16	
05.01.02.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	66.000.000	1	66.000.000	1 Berita Acara	100,00	65.258.958	98,88	
05.01.02.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	256.554.000	3	256.554.000	3 Dokumen	100,00	254.570.223	99,23	
05.01.02.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			78.000.000		94.500.000			93.279.445	98,71	
05.01.02.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	200 Orang	78.000.000	200	94.500.000	200 Orang	100,00	93.279.445	98,71	
05.01.02.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			96.434.000		96.434.000			95.604.342	99,14	
05.01.02.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	44.145.000	2	44.145.000	2 Laporan	100,00	43.660.085	98,90	
05.01.02.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	52.289.000	4	52.289.000	4 Laporan	100,00	51.944.257	99,34	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja		Rencana Kinerja Perubahan		Realisasi Kinerja				Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	
05.01.02.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			41.000.000		88.000.000			86.467.267	98,26	
05.01.02.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	41.000.000	1	88.000.000	1 Dokumen	100,00	86.467.267	98,26	
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			966.955.400		996.955.400			977.896.965	98,09	
05.01.03.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			377.083.200		377.083.200			364.080.641	96,55	
05.01.03.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	72.078.000	2	72.078.000	2 Laporan	100,00	69.041.782	95,79	
05.01.03.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	42.533.000	1	42.533.000	1 Laporan	100,00	41.852.960	98,40	
05.01.03.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	46.804.000	1	46.804.000	1 Dokumen	100,00	45.975.192	98,23	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja		Rencana Kinerja Perubahan		Realisasi Kinerja				Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	
05.01.03.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	8 Perangkat Daerah	47.152.000	8	47.152.000	8 Perangkat Daerah	100,00	46.636.032	98,91	
05.01.03.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	12 Perangkat Daerah	82.441.000	12	82.441.000	12 Perangkat Daerah	100,00	76.203.774	92,43	
05.01.03.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	86.075.200	1	86.075.200	1 Laporan	100,00	84.370.901	98,02	
05.01.03.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			280.333.200		266.305.200			261.473.387	98,19	
05.01.03.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Perangkat Daerah	59.595.000	4	16.095.000	4 Perangkat Daerah	100,00	15.927.604	98,96	
05.01.03.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	69.295.200	1	69.295.200	1 Laporan	100,00	68.487.698	98,83	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja		Rencana Kinerja Perubahan		Realisasi Kinerja				Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	
05.01.03.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2 Perangkat Daerah	102.451.000	2	102.451.000	2 Perangkat Daerah	100,00	101.343.548	98,92	
05.01.03.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Perangkat daerah	23.659.000	4	19.909.000	4 Perangkat daerah	100,00	19.417.815	97,53	
05.01.03.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	25.333.000	1	58.555.000	1 Laporan	100,00	56.296.722	96,14	
05.01.03.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			309.539.000		353.567.000			352.342.937	99,65	
05.01.03.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1 Perangkat Daerah	184.908.000	1	184.908.000	1 Perangkat Daerah	100,00	184.816.045	99,95	
05.01.03.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Perangkat Daerah	15.954.000	4	14.154.000	4 Perangkat Daerah	100,00	14.043.800	99,22	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja		Rencana Kinerja Perubahan		Realisasi Kinerja				Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	
05.01.03.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	108.677.000	1	154.505.000	1 Laporan	100,00	153.483.092	99,34	
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			290.015.400		280.309.400			275.779.582	98,38	
05.05.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			59.193.000		59.193.000			57.995.006	97,98	
05.05.02.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	59.193.000	1	59.193.000	1 Laporan	100,00	57.995.006	97,98	
05.05.02.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			63.564.000		63.564.000			62.748.248	98,72	
05.05.02.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	63.564.000	1	63.564.000	1 Dokumen	100,00	62.748.248	98,72	
05.05.02.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			167.258.400		157.552.400			155.036.328	98,40	
05.05.02.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	98.338.600	1	88.632.600	1 Dokumen	100,00	88.270.828	99,59	
05.05.02.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	68.919.800	1	68.919.800	1 Laporan	100,00	66.765.500	96,87	

